



Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan

(Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Grobogan)

Galih Sudarsono, Darsono

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239. Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this research to examine and analyze the influence of the internal control system, human resource competencies and application of local government financial accounting system to the information value of accounting entity financial..

The questionnaires amounted to 57 distributed to all the chief financial officer on employees of local government units (SKPD) the local government of Grobogan regency. Data were collected using questionnaire survey. The data were processed using SPSS version 21.0. The multiple linear regression analysis was employed to test research hypotheses.

The results of hypothesis testing show that the internal control system, human resource competencies and application of local government financial accounting system have significant positive effects on the information value of accounting entity financial reporting.

Keywords :internal control system, human resource competencies, application of local government financial accounting system, and the information value of accounting entity financial.

PENDAHULUAN

Fokus penelitian ini dibahas beberapa alasan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada kabupaten Grobogan. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia pada saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statements No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelapor keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Penjekasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrual. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.

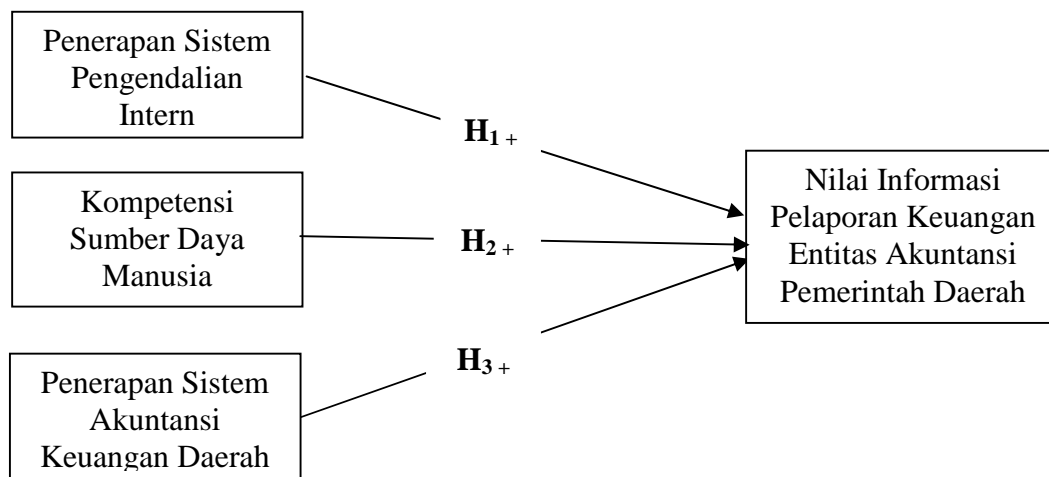
Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini

sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Laporan keuangan pemerintah diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor sistem pengendalian intern, kompetensi SDM, dan sistem akuntansi keuangan daerah yang diduga mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Grobogan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Hubungan yang logis antar variabel dalam penelitian ini diuraikan dan digambarkan dalam kerangka pemikiran penelitian ini. Kerangka pemikiran tersebut berisi hubungan antar variabel mengenai hubungan antara Penerapan sistem pengendalian intern, Kompetensi sumber daya manusia, Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Kerangka teoritis digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran tersebut menggambarkan hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen pada hipotesis-hipotesis penelitian ini. menjelaskan bahwa variabel independen Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki hubungan positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Dalam PP No. 60 tahun 2008 bahwa pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini "tidak wajar dan/atau *disclaimer*" diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). Indriasari dan Nahartyo (2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan.

Teori agensi menjelaskan bahwa dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna

informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu kriteria pemberian opini laporan keuangan adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara sistem pengendalian intern dengan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₁ :Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki pendidikan (*education*), keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005).

Perubahan yang akan dilakukan untuk membenahi sistem pemerintahan terutama terkait dengan bidang akuntansi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kompetensi yang memadai, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk.

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan. Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/ tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yangada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah (Rosalin, 2011). Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi yang ada dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi bisa jadi kualitasnya buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya sebagaimana yang masih banyak

ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₂ :Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Pada prinsipnya, SAKD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar (Permendragi No 64 Tahun 2013). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) adalah sebagai berikut. :

- a. Tertib
Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan
Taat adalah pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Efektif
Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Efisien
Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- e. Ekonomis
Ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- f. Transparan
Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- g. Bertanggung Jawab
Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan perlakuan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- h. Keadilan
Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- i. Kepatutan
Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- j. Manfaat untuk masyarakat
Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonom daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan antara penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah dengan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₃ :Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah secara khusus pada Kabupaten Grobogan. Variabel bebas yang diteliti adalah sistem pengendalian intern. Oleh sebab itu, akan dibahas juga mengenai definisi dan variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Secara garis besar dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan independen.

Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah..

Nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008). Jumlah item pernyataan adalah 7 item dengan skala Likert 1-5. Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
2. Laporan keuangan pemerintah daerah;
 - Neraca : menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
 - Laporan realisasi anggaran : menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
 - Laporan arus kas : menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
 - Catatan atas laporan keuangan : berisi penjelasan atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas.
3. Informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dapat diuji.
4. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.
5. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
6. Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.
7. Laporan keuangan disampaikan secara sistematis dan teratur.
8. Laporan keuangan memiliki unsur relevan, jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang. Serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
9. Laporan keuangan memiliki unsur reliable berarti bahwa informasi tersebut dapat dipercaya, karena cukup terbebas dari penyimpangan di dalam penyajiannya.
10. Laporan keuangan memiliki unsur timeliness berarti informasi akuntansi tersebut tersedia pada saat dibutuhkan oleh para pemakainya.
11. Laporan keuangan memiliki unsur dapat dipahami. Kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami.

Variable Independen

Variable Independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- **Sistem Pengendalian Interen**

Pengendalian interen terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang didalam pencapaian sasaran menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang telah berlaku. Jumlah item pernyataan variabel sistem pengendalian intern adalah 9 item dengan skala Likert 1-5. Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Subbagian keuangan/akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi yang meliputi :
 - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas.
 - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas.
 - c. Prosedur akuntansi asset.
 - d. Prosedur akuntansi selain kas.
2. Daftar rekening (*chart of account*) pemerintah daerah tersedia dan digunakan.
3. Otorisasi dari pihak yang berwenang terhadap transaksi keuangan daerah selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang.
5. Setiap transaksi yang telah terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.
6. Setiap transaksi dicatat dalam bentuk buku catatan akuntansi.
7. Catatan akuntansi dijaga untuk tetap “up-to-date”.
8. Laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan.
9. Sistem akuntansi yang ada memungkinkan *audit/transaction trail*.
10. Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD.
11. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja.
12. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi.

- **Kompetensi Sumber Daya manusia**

Sistem akuntansi merupakan salah satu sistem informasi yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjalankan sistem informasi yang ada, sehingga dapat menghasilkan informasi pelaporan keuangan yang berkualitas. Jumlah item pernyataan variabel kompetensi sumber daya manusia adalah 10 item dengan skala Likert 1-5. Variabel ini diukur dengan menggunakan pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Subbagian keuangan atau akuntansi memiliki staf yang berkualitas dalam jumlah yang cukup.
2. Para pegawai yang melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai bidang tugasnya masing masing.
3. Subbagian keuangan/akuntansi anda memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.
4. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan atau akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
5. Uraian tugas subbagian keuangan atau akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.
6. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.
7. Subbagian keuangan atau akuntansi telah melaksanakan proses akuntansi.
8. Subbagian keuangan atau akuntansi memiliki sumber daya pendukung oprasional yang cukup.
9. Pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.

10. Dana-dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Direktorat Informasi dan Akuntansi Departemen Keuangan RI (2004) Sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jumlah item pertanyaan adalah 7 item dengan skala Likert 1-5. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan diukur dengan indikator yaitu:

1. Kesesuaian sistem dengan SAP
2. Pengidentifikasian transaksi
3. Pencatatan transaksi
4. Bukti disetiap transaksi
5. Pencatatan kronologis
6. Pengklasifikasian transaksi
7. Laporan keuangan yang konsisten dan periodic.

Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini besarnya populasi, yaitu pada pegawai SKPD di Kabupaten Grobogan. Jumlah SKPD yang terdiri dari kantor, sekretariat, bagian, dinas, badan, satuan, RSUD, inspektorat pada Kabupaten Grobogan sebanyak 57 orang. Dengan demikian, lokasi penelitiannya adalah pada seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang berjumlah 57 SKPD. Oleh karena jumlah anggota populasi dalam penelitian ini relative sedikit, yaitu 57 orang, maka seluruh anggota populasi tersebut di jadikan responden penelitian secara keseluruhan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Statistik deskriptif juga digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai data-data terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, dilakukan pengujian kelayakan model regresi untuk menilai model regresi dalam penelitian ini. Berikut uraian penjelasan mengenai metode analisis dalam penelitian ini:

$$Y = + {}_1X_1 + {}_2X_2 + {}_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = kualitas laporan keuangan

= konstanta

${}_1$ = koefisien regresi dari X_1

${}_2$ = koefisien regresi dari X_2

${}_3$ = koefisien regresi dari X_3

X_1 = sistem pengendalian intern

X_2 = kompetensi sumber daya manusia

X_3 = penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

e = standar error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Tabel 4.19 berikut menunjukkan hasil uji regresi linier berganda.

Persamaan Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations
		B	Std. Error	Beta			Zero-order
1	(Constant)	-15,068	7,100		-2,122	,038	
	X1	,335	,089	,360	3,759	,000	,434
	X2	,507	,111	,440	4,588	,000	,546
	X3	,683	,169	,379	4,052	,000	,383

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan table 4.19 di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$Y = -15,068 + 0,335 X_1 + 0,507 X_2 + 0,683 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

X₁ = Sistem Pengendalian Intern

X₂ = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X₃ = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta sebesar -15,068 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari ketiga variabel independen dan faktor lain, maka variabel nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Grobogan adalah -15,068.
2. Variabel sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh sebesar 0,335 terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Berarti setiap kenaikan satu (Y), maka X₁ akan mengalami kenaikan sebesar 0,335.
3. Variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh sebesar 0,507 terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Berarti setiap kenaikan satu (Y), maka X₂ akan mengalami kenaikan sebesar 0,507.
4. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh sebesar 0,683 terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Berarti setiap kenaikan satu (Y), maka X₃ akan mengalami kenaikan sebesar 0,683.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah sistem pengendalian intern mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan nilai t sebesar 3,759 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah dengan arah positif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H₁) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah **diterima**. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian intern, maka semakin baik nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan nilai t sebesar 4,588 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah dengan arah positif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_2) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah **diterima**. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bagus kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah penerapan sistem akuntansi daerah mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan nilai t sebesar 4,052 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ berarti bahwa penerapan sistem akuntansi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah dengan arah positif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_3) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah **diterima**. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bagus penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin baik nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian atas hubungan antara variabel sistem pengendalian intern dengan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif. Sistem pengendalian intern secara signifikan meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Arfianti (2011), Sukmaningrum (2012), dan Pramudiarta dan Juliarto (2015).

Hasil penelitian ini berhasil mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan adanya sistem akuntansi yang dijalankan sesuai prosedur, adanya bukti transaksi, catatan akuntansi dan adanya pemisahan tugas dalam pelaksanaan APBD membuat sistem pengendalian intern berjalan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi (Arfianti, 2011).

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian atas hubungan antara variabel kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dengan arah positif. Kompetensi sumber daya manusia secara signifikan meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent* (Sukmaningrum, 2012). Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Sukmaningrum, 2012).

Persepsi pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Grobogan terhadap kompetensi sumber daya manusia adalah baik sehingga Semakin tinggi pendidikan (*education*), keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) yang dimiliki pegawai SKPD maka akan memiliki rasa tanggung jawab dan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang baik pula. Sebaliknya semakin rendah pendidikan (*education*), keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) yang dimiliki pegawai SKPD maka kurang memiliki rasa tanggung jawab dan akan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang rendah. Latar belakang SDM yang memadai dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Zuliarti (2012) yang menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, yang dalam penelitian ini adalah variabel nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Akuntansi Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian atas hubungan antara variabel penerapan sistem keuangan akuntansi dengan kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dengan arah positif. Kompetensi sumber daya manusia secara signifikan meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nurlillah (2014)

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik, dalam hal ini maka semakin sesuai penerapan sistem keuangan akuntansi daerah dengan tahapan-tahapan standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemakmuran daerah. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang telah dijalankan sesuai prosedur, sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 dengan perolehan sampel menggunakan *sampling kuota* pada Kepala Urusan Keuangan dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Grobogan yang berjumlah 57 orang.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini, maka dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Grobogan menganggap bahwa sistem pengendalian intern yang baik akan menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi yang baik.

Kedua kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Persepsi pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Grobogan terhadap kompetensi sumber daya manusia adalah baik. Hal ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan yang tinggi dan lamanya pengalaman kerja. Latar belakang sumber daya manusia yang memadai dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Ketiga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Persepsi pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Grobogan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah adalah baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Grobogan menganggap bahwa sistem penerapan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi yang baik.

Keterbatasan

Ada beberapa keterbatasan yang teridentifikasi dalam penelitian ini :

1. Penelitian ini dilakukan hanya di Kabupaten Grobogan. Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *sampling kuota* sehingga penentuan sampel cenderung subyektif bagi peneliti. Dengan kata lain validitas eksternal dari hasil penelitian ini masih cukup rendah.
2. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, sehingga mempengaruhi validitas hasil. Jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara ataupun pertanyaan lisan.

Saran

- 1) Agar Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tidak bergerak menurun, maka dapat dilakukan dengan berusaha meningkatkan variable Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi SDM, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
- 2) Upaya-upaya peningkatan Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi SDM, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah hendaknya diarahkan pada indikator-indikator variable yang masih lemah.
- 3) Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode pengambilan sampel selain *sampling kuota*, misalkan *purposive sampling*, *probability sampling (simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportion stratified random sampling, area sampling)* atau metode pengambilan sampel yang lainnya.

REFERENSI

- Arfianti, Dita. 2011. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)". http://eprints.undip.ac.id/29808/1/Artikel_Jurnal1.pdf. Diakses 4 September 2015.
- Badjuri, A. dan Trihapsari, E., 2004, "Audit Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah". Fokus Ekonom, Vol. 3, No.2, pp. 27-32.
- Ghozali, I dan Chariri, A 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.
- Gray, R., Kouhy R., dan Lavers, S. (1995b). "Methodological Themes : Constructing A Reserch Database of Social and Environmental Reporting By UK Companies." *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 8, No. 2, pp. 44-77.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Huda, Ulul. 2009. "Hubungan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Kekuasaan Lokal; Sebuah Penilaian Mengenai Dampak yang ditimbulkan", <http://ululbanyuwangi.blog.com/2009/10/16/hubungan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dengan-kekuasaan-lokal-sebuah-penilaian-mengenai-dampak-yang-ditimbulkan/>. Diakses 7 September 2015.
- Indriasari, D. dan E. Nahartyo., 2008, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)", Simposium Nasional Akuntansi XI.Pontianak.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Kaya, Ozan. (2008). Companies Responses to Climate Change : The Case of Turkey. *European Journal of Social Sciences*, Vol. 7, No. 2, pp. 53-62.
- Lillrank, Paul. 2003. *The Quality of Information. International Journal of Quality & Reliability Management*, Vol. 20 No. 6, pp.691 - 703
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomidan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah, 2005. *Sistem Informasi Keuangan Daerah*. PP No. 56 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah, 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PP No. 58 Tahun 2005.



- Peraturan Pemerintah, 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. PP Nomor 60 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah, 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. PP Nomor 71 Tahun 2010.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003* tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004*. tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004*. tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004*. tentang Pemerintah Daerah.
- Pramudiarta, R. dan Juliarto, A., 2015, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah." *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 4, No. 3, Pp 1-14.
- Sutaryo. 2011. "Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Dengan *E-Government System*." <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/2011/06/20/nilailaporankeuangan-pemerintah-dengan-e-government-system/>. Diakses 7 September 2015..
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten dan Kota Semarang)*". <http://eprints.undip.ac.id/35305/1/JURNAL.pdf>. Diakses 7 September, 2015
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Winidyaningrum, C. dan Rahmawati., 2010, "*Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*", Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.